

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinasti politik merupakan kekuasaan yang diberikan secara turun-temurun dilakukan suatu kelompok keluarga yang masih terikat dengan hubungan darah yang bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan¹. Secara harfiah dinasti politik adalah di mana sebuah jabatan publik dikuasai secara turun-temurun tanpa adanya jeda dari pihak lain. Apabila terjadi maka bukan dikatakan dinasti politik karena yang dikhawatirkan dari dinasti politik adalah kecurangan akibat campur tangan dari suatu kekuasaan.

Di sebuah sistem dinasti politik mencakup beberapa bentuk seperti monarki absolut, oligarki, atau republik berkaitan dengan keluarga yang mempunyai kekuasaan, memiliki pengaruh besar dalam politik yang mewariskan jabatan. Dinasti politik dibuat untuk membuat strategi agar memperoleh kekuasaan, kegiatan ini memiliki sisi positif ataupun negatif, dalam sisi positif adalah menstabilisasi dalam tugas dan kepemimpinan serta tanggung jawab, tetapi generasi yang mempunyai kekuasaan ialah generasi yang memang kompeten dan mumpuni, jadi dinasti politik sangat membantu dalam pengasingan grup.

Dinasti politik mengakibatkan hilangnya demokrasi, mengabaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat, menghilangkan kesempatan orang lain, ketidakmerataan akses yang diterima oleh masyarakat karena mereka terpusat pada kepentingan suatu keluarga. Walaupun sistem ini dapat memberikan stabilitas dan tanggung jawab, namun dampak negatif seperti penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan pembatasan demokrasi.

Dinasti politik telah lama hadir di negara-negara demokrasi dan menimbulkan kekhawatiran terjadinya ketidaksetaraan distribusi kekuasaan politik yang mencerminkan ketidaksempurnaan dalam representasi demokratis dalam politik yang disebut kekuasaan melahirkan kekuatan. Kemudian, hal ini

¹ Wikipedia. Dinasti Politik

mengingatkan kekhawatiran Mosca, bahwa setiap kelas menampilkan kecenderungan untuk menjadi turun-temurun, bahkan ketika posisi politik terbuka untuk semua, kedudukan keluargapenguasa akan dianugerahi berbagai keuntungan² (Synder, dkk 2009:115)

Kehadiran dinasti politik meliputi perebutan kekuasaan di tingkat daerah sampai nasional mengakibatkan substansi demokrasi sendiri sulit untuk diwujudkan. Tumbuhnya dinasti politik tidak dapat terlepas dari peran partai politik dan regulasi tentang Pilkada. Oligarki ditubuh partai politik menyebabkan mekanisme kandidasi dan pencalonan tidak berjalan sebagaimana semestinya. Kebanyakan pencalonan kandidat oleh partai politik berdasarkan keinginan elite partai, tidak melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon. Secara bersamaan, dinasti politik terus membangun jejaring kekuasaannya dengan kuat supaya tetap mempertahankan kekuasaannya dalam tubuh partai ditingkat daerah atau dipusat. Jadi, dinasti politik dapat menguasai dan mematikan demokrasi dalam partai politik.

PDI telah mengalami banyak konflik internal dari awal berdiri ditambah dengan intervensi pemerintah. Pada tahun 1993, Megawati Soekarnoputri didukung menjadi ketua umum PDI, namun pemerintah Orde Baru menolaknya. Walaupun demikian, beliau terpilih secara de facto sebagai ketua umum DPP PDI dari tahun 1993 sampai 1999 yang menimbulkan konflik internal di partai.

PDI menjadi lebih kuat dibawah kepemimpinan Megawati setelah Soeharto lengser ditahun 1993. Pada tanggal 1 Februari 1999, Megawati memutuskan untuk mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan (PDIP) supaya bisa berpartisipasi dalam pemilu³. Ditanggal 14 Februari 1999, nama tersebut disahkan oleh notaris di Istora Senayan, Jakarta. Selanjutnya

² Susanti, Martien Herna. 2017. "Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia". Journal of Government and Civil Society, Vol. 1, No. 2, 111-119.

³ Wikipedia. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Megawati terpilih kembali menjadi ketua umum DPP PDIP dari tahun 2000 hingga 2005.

Pola sirkulasi kepemimpinan di PDI Perjuangan sejak terbentuknya partai tahun 1993 sampai tahun 2030 yang membuktikan dominasi tokoh sentral, khususnya Megawati Soekarnoputri. Megawati merupakan tokoh sentral yang mempunyai kendali kuat dalam internal partai selama beberapa periode, mengukuhkan posisi merupakan simbol dan pemimpin utama yang tidak mudah digantikan. Kepemimpinan ini membuat partai sangat bergantung pada figur sentralnya, alhasil proses pergantian kepemimpinan lebih bersifat inkremental dan dikendalikan oleh elite yang berafiliasi dengan Megawati.

Megawati mendominasi struktur kepemimpinan yang menyebabkan signifikan terhadap mekanisme kaderisasi dan regenerasi di PDI Perjuangan. Kekecewaan terhadap pemimpin membuat proses kaderisasi lebih berpihak pada loyalitas dan figur yang mendukung status quo, selanjutnya regenerasi kepemimpinan ideal seperti pembaruan usia dan penyegaran visi sering tertunda. Dari sistem seperti ini, kader yang tidak mempunyai kedekatan dengan elite akan sulit berada diposisi strategis, sehingga akan menimbulkan stagnasi inovasi dan dinamika dalam partai.

Sirkulasi kepemimpinan yang kurang dinamis membuat PDI Perjuangan menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas politik internal dan kebutuhan adaptasi terhadap perubahan zaman. Terbatasnya regenerasi yang optimal menghambat kesiapan partai untuk menghadapi persaingan politik yang semakin kompleks di masa depan.

Stagnasi elite merupakan kondisi di mana kelompok elite mengalami ketidakberdayaan dan kehilangan daya juang untuk melakukan perubahan dalam sistem politik, ekonomi, dan sosial⁴. Biasanya stagnasi disebabkan kepentingan dominasi atau elite tertentu, konflik antar elite atau kerjasama oligarki yang mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok kemudian menghambat proses inovasi dan reformasi yang dibutuhkan oleh masyarakat

⁴ Kompasiana. (2024). Mengapa Konflik Antar Elite Berbahaya?

luas. Hal ini, menyebabkan elite lebih fokus menjaga kekuasaan daripada memajukan kemajuan negara.

Menariknya, fenomena stagnasi elite justru menimbulkan paradoks antara stabilitas dan demokratisasi dalam partai politik. Di satu sisi, dominasi elite lama seperti dalam kasus PDI Perjuangan mampu menjaga konsistensi ideologi dan arah politik partai. Sedangkan disisi lainnya kondisi ini menghambat proses regenerasi kader dan inovasi politik yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial. Seperti yang ditegaskan oleh Vilfredo Pareto (2030) dalam teori sirkulasi elite, ketika pergantian elite tidak berjalan secara wajar maka sistem politik cenderung membeku dan kehilangan vitalitasnya⁵. Gaetano Mosca (1939) juga menjelaskan bahwa kelas penguasa yang tidak mengalami pembaruan akan membentuk "minoritas tertutup" yang mempertahankan kekuasaan melalui mekanisme internal yang eksklusif⁶.

Dalam konteks modern, C. Wright Mills (1956) menyebutkan kondisi ini sebagai terbentuknya power elite yaitu kelompok kecil yang menguasai pusat-pusat kekuasaan dan menutup ruang partisipasi bagi kelompok lain⁷. Robert Michels (1911) melalui hukum besinya (*iron law of oligarchy*) memperingatkan bahwa setiap organisasi besar, termasuk partai politik lebih mengalami oligarkisasi karena kekuasaan terpusat pada segelintir pemimpin yang sulit digantikan⁸. Demikian, stagnasi elite menjadi menarik untuk diteliti karena menunjukkan bagaimana proses sirkulasi kepemimpinan yang ideal dalam partai politik terhambat oleh faktor dominasi figur sentral, loyalitas personal, dan lemahnya mekanisme demokrasi internal.

Stagnasi elite berdampak luas dan merugikan. Pertama, stagnasi menimbulkan kemacetan didalam proses pengambilan kebijakan publik yang efektif, alhasil masalah masyarakat tidak dapat terselesaikan dengan baik dan terjadinya ketimpangan sosial. Kedua, terbitlah negara shadow atau *shadow*

⁵ Pareto, V. (1935). *The mind and society*. Harcourt, Brace and Company.

⁶ Mosca, G. (1939). *The ruling class*. New York: McGraw-Hill.

⁷ Mills, C. W. (1956). *The power elite*. Oxford University Press

⁸ Michels, R. (1911). *Political parties: A sociological study of the oligarchical tendencies of modern democracy*. New York: Free Press.

state yang memperkuat oligarki mengakibatkan kelemahan pada institusi pemerintahan dan demokrasi, karena keputusan lebih dikendalikan oleh kelompok elite tertentu tanpa adanya representasi yang adil. Situasi ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah⁹ dan memperbesar wawasan sosial-ekonomi.

Sementara itu, stagnasi elite menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan menjadi lambat atau bahkan terhenti. Ketika elite ekonomi dan politik tidak berinovasi atau berbagi kekuasaan, sumber daya negara dikelola demi kepentingan pribadi mereka, sedangkan kebutuhan masyarakat banyak yang diabaikan. Hal ini, membuat kemiskinan dan ketidakadilan sosial sulit diatasi, serta menciptakan ketidakstabilan politik yang bisa merusak sistem demokrasi dan kesejahteraan secara menyeluruh.

Megawati Soekarnoputri telah menjabat menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan selama dua dekade dan menjadi figur sentral yang sangat mengendalikan arah dan keputusan partai. Dominasi figur tunggal mencerminkan praktik politik dinasti yang kuat dimana kekuasaan cenderung terpusat disatu elite inti. Situasi ini, mempengaruhi proses demokratisasi internal partai, yang dimana anggota tingkat bawah dan pengurus lokal suaranya terbatas terutama dalam hal pengambilan keputusan strategis.

Situasi dominasi satu figur dalam waktu yang lama memiliki implikasi serius terhadap proses kaderisasi dan regenerasi partai. Kurangnya sirkulasi elite membuat kader potensial sulit berada diposisi strategis, yang menyebabkan inovasi dan pamaruan dalam internal terbatas. Stagnasi kepemimpinan ini mengurangi motivasi anggota untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, menghambat partisipasi poliik internal, dan memicu turunkan kepercayaan publik terhadap kredibilitas partai. Maka dari itu, penguatan mekanisme demokrasi internal, transparansi, serta kesempatan

⁹ Maysarah Harahap. (2023). "Elite Politik di Indoensia: Akar dan Dampak Penyalahgunaan Hak Berdemokrasi". Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

regenerasi kepemimpinan menjadi penting untuk menjaga legitimasi dan efektivitas PDI Perjuangan sebagai partai politik¹⁰.

Penelitian ini juga mempertimbangkan bagaimana dinamika politik nasional, seperti reformasi 1993, konsolidasi demokrasi, dan pelaksanaan Pilkada langsung, turut mempengaruhi pola sirkulasi kepemimpinan dalam tubuh PDI Perjuangan. Dengan demikian, Penelitian ini akan terfokus pada pola sirkulasi kepemimpinan di tubuh PDI Perjuangan selama periode 1993-2024. Tahun 1993 dipilih sebagai awal karena mencatat fase pemantapan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri di PDI, yang membuat dasar ketatanan kepemimpinan PDI Perjuangan sampai periode terbaru. Maka demikian, analisis bida menganalisis secara komprehensif pergerakan sirkulasi elite dalam tiga dekade lebih.

Secara lebih spesifik, Penelitian ini berfokus pada posisi kepemimpinan strategis di DPP PDI Perjuangan meliputi Ketua Umum, Sekretaris Jendral, Bendahara Umum, Wakil Sekretariat Jendral, dan Wakil Bendahara. Tujuan utama adalah menguari tingkat keberhasilan regenerasi beserta distribusi kekuasaan dalam kerangka inti partai untuk menentukan apakah sirkulasi elite berjalan secara terbuka atau terperangkap dalam stagnasi kepemimpinan yang lama.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam partai politik modern, sirkulasi elite adalah keniscayaan dan indikator kesehatan demokrasi internal partai tersebut. Idealnya sirkulasi elite terjadi melalui mekanisme formal seperti partai Kongres atau pemilihan umum (election), yang dimana peralihan kekuasaan dari satu kelompok elite ke kelompok lain secara teratur dan demokratis. Mekanisme ini sangat penting demi menjaga pembaruan kepemimpinan, regenerasi tokoh politk, serta

¹⁰ Junedi Lumban Gaol. (2021). "Demokratisasi Dan Desentralisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Pemilukada Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018".

mencegah terjadinya stagnasi dan dominasi kelompok tertentu yang bisa meningkatkan kualitas demokrasi di internal partai.

Terdapat studi kasus di Kabupaten Ponorogo mengilustrasikan terhadap pentingnya sirkulasi elite melalui proses pemilihan kepala daerah lokal (Pilkada) yang menjadi arena bagi elite politik menunjukkan pergantian antara elite yang sedang memerintah (governing elite) dan elite yang tidak memegang jabatan pemerintah (non-governing elite). Hasil studi menunjukkan bahwa sirkulasi bukan hanya dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi dan politik namun juga sangat dipengaruhi oleh modal sosial dan hubungan dengan masyarakat. Mekanisme formal Pilkada memungkinkan proses sirkulasi elite berjalan secara efektif ketika kandidat baru bisa beradaptasi dan menjawab kebutuhan sosial masyarakat yang terus berubah¹¹.

Proses sirkulasi elite melalui mekanisme formal seperti pemilu mencerminkan kesehatan demokrasi internal partai, regenerasi politik yang penting agar sistem politik partai dan sistem politik terus dinamis dan terbuka untuk tokoh-tokoh baru. Sedangkan, kegagalan sirkulasi elite seperti stagnasi atau dominasi kelompok elite lama menjadi tanda lemahnya demokrasi internal dan bisa berdampak negatif pada legitimasi serta kinerja partai politik tersebut.

Partai politik mempunyai peran sebagai gatekeeper sekaligus menghasilkan calon pemimpin nasional (elite) yang sangat penting untuk keberlangsungan demokrasi. Sebagai gatekeeper, partai bertugas menyaring dan menentukan siapa yang layak untuk menjadi kader dan diusung sebagai calon pemimpin, alhasil mekanisme pengisian posisi politik berlangsung secara teratur dan terkendali. Maka dari itu, partai berperan penting dalam menjaga kualitas kepemimpinan politik yang muncul dari internalnya.

Sebagai wadah meritokrasi, partai politik sebaiknya memberikan kesempatan yang adil bagi para kadernya untuk naik berdasarkan prestasi, kompetensi, integritas, dan dedikasi. Proses ini dilakukan melalui kaderisasi yang sistematis, seperti seleksi bakat, pelatihan, pendidikan politik, pengalaman lapangan, pelatihan berkelanjutan, dan mekanisme pengembangan kader yang transparan dan objektif.

¹¹ Rizki Melina.(2024). "Sirkulasi Elite Lokal di Kabupaten Ponorogo". Journal.ranahresearch

Tetapi, proses kaderisasi menghadapi berbagai tantangan yaitu favoritisme, kurangnya transparansi, dan kesenjangan gender yang menghambat keterwakilan perempuan. Jadi, partai perlu mengadopsi kebijakan afirmatif, kuota gender, dan mengembangkan program pendidikan serta pelatihan khusus bagi kader perempuan untuk memastikan inklusivitas dan representasi yang adil.

Bung Hatta pernah menyatakan bahwa kaderisasi adalah kerangka kebangsaan karena kaderisasi artinya sama dengan menanam bibit agar menghasilkan pemimpin bangsa di masa depan, pemimpin pada masanya harus menanam. Mengapa kaderisasi kepemimpinan sangat diperlukan karena semua manusia termasuk yang menjadi pemimpin akan mengakhiri kepemimpinannya baik itu dikehendaki ataupun tidak. Proses ini dapat terjadi karena terdapat beberapa faktor yang menjadikan mengapa kaderisasi kepemimpinan ini sangat diperlukan, diantaranya (Rivai, p. 2006):

- a. Adanya ketentuan periode kepemimpinan seseorang dalam sebuah organisasi;
- b. Adanya penolakan dari anggota kelompok yang menghendaki pergantian kepemimpinan, baik secara wajar ataupun tidak wajar
- c. Proses alamiah yakni usia yang menjadi tua dan kehilangan kemampuan memimpin (pensiun)
- d. Kematian
- e. Dapat membentuk organisasi dengan perkiraan dalam jumlah ketersediaan pemimpin yang diperlukan dimasa depan secara berkesinambungan¹².

PDI Perjuangan merupakan salah satu partai politik terbesar di Indonesia yang mempunyai sejarah panjang sejak awal berdirinya sebagai fusi beberapa partai nasionalis dari tahun 1973¹³. Partai ini dikenal sebagai partai yang memperjuangkan ideologi nasionalisme dan marhaenisme dengan Pancasila sebagai dasarnya. Sejak reformasi, PDI Perjuangan telah memainkan peran besar dalam politik nasional Indonesia, memenangkan banyak pemilu legislatif

¹² Insan Harapan. "Kaderisasi Partai Politik dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional"

¹³ Enggar Adi.(2024). "PDI Perjuangan dan Sejarah Panjang Kontestasi Politik". DerapJuang

dan menjadi partai pelopor di tengah persaingan dengan partai lain yang mempunyai ideologi dan lambang yang serupa.

Secara empiris, kepemimpinan PDI Perjuangan memberikan dominasi yang kuat dan mempesona pada satu tokoh utama, yaitu Megawati Soekarnoputri, putri dari Proklamator Bung Karno. Megawati menjadi ketua umum PDI Perjuangan selama lima periode sejak 1993, hal ini menjadikan beliau mendapatkan rekor terlama posisi ketua umum partai politik di Indonesia hingga Asia Tenggara. Keberadaan Megawati di kursi pimpinan partai tidak hanya karena warisan sejarah dan *prestise*, namun juga dukungan besar dari berbagai golongan pendukung partai.

Dominasi kepemimpinan Megawati memberikan implikasi berupa personalisasi partai politik, di mana kekuasaan dan pengaruh partai sangat terkait dengan figur Megawati sendiri. Hal tersebut menyebabkan konflik kepentingan elite dan fragmentasi politik dalam partai sehingga mempengaruhi dinamika internal dan strategi politik secara signifikan. Megawati tampil menjadi pemimpin simbolik yang mewakili kekuatan ideologis dan emosional partai, sekaligus pengendali utama dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan arah politik PDI Perjuangan.

Selanjutnya, keberadaan Megawati sebagai tokoh sentral memberikan stabilitas dan kekuatan politik yang kuat bagi PDI Perjuangan, sehingga partai ini tetap eksis dan menjadi kekuatan terbesar di kancah politik nasional selama lebih dari dua dekade. PDI Perjuangan dibawah kepemimpinan Megawati dapat memenangkan berbagai pemilu legislatif dan tetap menjaga loyalitas kader serta basis massa mereka hingga masa yang akan datang.

Pola kepemimpinan Megawati Soekarnoputri di PDI Perjuangan menunjukkan adanya penyimpangan dari sirkulasi elite yang normal dan sehat dalam tubuh partai politik demokratis. Sirkulasi elite yang ideal seharusnya terjadi secara berkala lewat mekanisme internal partai dan tidak bergantung pada figur tunggal yang sangat dominan, kemudian mendorong pembaruan, regenerasi, dan keberagaman kepemimpinan.

Namun kenyataannya, kekuasaan Megawati selama lebih dari lima periode hingga saat ini (1993-2024) tidak mengalami tantangan signifikan yang

membuat perpecahan besar atau munculnya pesaing yang mampu menandingi otoritasnya secara efektif. Upaya kelompok atau kader yang mencoba melawan dominasi Megawati seperti Eros Jarot justru selalu gagal. Upaya tersebut menimbulkan fragmentasi dan konflik internal di tubuh partai serta menampilkan kekuasaan Megawati sangat personalistik dan karismatik yang membuat sulit ditandingi oleh kelompok penentang. Kemudian, kader yang mencoba melawan berakhir dengan disintegrasi internal atau membunuh keberadaan mereka sendiri.

Dalam lanskap politik Indonesia, penggunaan simbol visual sering kali menjadi medium strategis dalam menegaskan legitimasi. Hal yang dilakukan PDI Perjuangan dengan memanfaatkan potret Soekarno diberbagai atribut kampanyenya. Pada tingkat dasar, ini merupakan upaya membangkitkan nostalgia dan asosiasi ideologis. Tetapi, pada level yang lebih dalam, potret soekarno diinterpretasikan sebagai refleksi dari kesadaran Megawati Soekarnoputri atas *privilege* dan *prestise* yang melekat pada dirinya.

Hak istimewa ini secara fundamental bersifat genealogis, yaitu berakar kuat dengan hubungan darahnya sebagai putri dari Proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia. Menurut perspektif pemikiran *Foucaultian*¹⁴, pengetahuan atas hak istimewa keturunan tidak hanya sebagai catatan historis yang pasif. Sebaliknya, pengetahuan ini secara aktif diubah menjadi sumber kekuasaan politik yang sah. Pengetahuan tentang "darah Soekarno" yang dimanfaatkan sebagai klaim politik yang sulit dibantah, karena dasar yang mendasarinya bersifat historis dan emosional, bukan hanya kompetensi teknis.

Dengan mengangkat citra Soekarno, para pemimpin politik dan partai politik mendapatkan legitimasi yang kuat, karena sosoknya terikat dengan sejarah perjuangan kemerdekaan dan cita-cita bangsa. Selanjutnya, dibalik gambaran yang heroik ini terdapat mekanisme yang lebih kompleks: klaim historis yang berkaitan dengan Soekarno dimanfaatkan sebagai modal politik

¹⁴ Risalah Damar, Rizky Abrian.(2023). "Papan Reklame Perjuangan PDI Soekarno Sebagai Upaya Melanggengkan Kekuasaan: Sebuah Kajian Analisis Wacana Kritis". Jurnal Disastri

untuk mengamankan, melanggeng dominasi, dieksploitasi untuk kepentingan kekuasaan.

Aturan utama dalam kongres atau mekanisme internal partai dimanfaatkan dan diatur sedemikian rupa alhasil tidak membuka ruang bagi elite lain dan mencegah terjadinya kompetisi yang sehat sehingga menciptakan stagnasi elite. Contoh nyata dalam PDI Perjuangan dimana pelaksanaan Partai Kongres yang sebenarnya merupakan momen demokrasi internal, namun sepenuhnya berada ditangan ketua umum. Hal ini membuat Kongres sering tertunda menggu "keputusan" pimpinan partai, bukan untuk memberikan ruang diskusi dan kompetisi antar lit. Namun, mekanisme ini menjadi alat untuk menjaga status quo dan menghambat kenaikan elite bari atau pesaing potensial yang bisa mengancam dominasi kepemimpinan yang ada. Pola ini berpotensi menjadikan partai lebih sebagai organisasi yang dikuasai oleh oligarki internal daripada arena demokrasi yang terbuka dan inklusif¹⁵.

Stagnasi elite dalam partai PDI Perjuangan memberikan dampak signifikan pada dinamika internal partai ataupun proses demokratisasi di Indonesia secara umum. Di internal partai, stagnasi elite menimbulkan rendahnya prinsip meritokrasi sehingga kader dengan prestasi dan kompetensi tidak mempunyai peluang yang proporsional untuk berkembang dan menduduki posisi strategis. Hal ini, juga berpotensi menimbulkan friksi tersembunyi diantara kader-kader yang merasa tidak memiliki kesempatan, walaupun konflik itu tidak selalu keliatan secara terbuka. Dampak lainnya yaitu melemahnya inovasi dan pembaruan politik dalam partai karena dominasi elite lama yang cenderung mempertahankan status quo.

Terhadap proses demokrasi nasional, stagnasi partai elite membatasi pasokan calon pemimpin nasional yang beragam dan berkualitas. Ketika PDI Perjuangan mengalami dominasi elite yang panjang dan mendambakan satu figur, regenerasi dan kemunculan figur baru menjadi terhambat. Hal ini, membatasi ruang bagi munculnya kepemimpinan alternatif yang dapat memperkaya spektrum demokrasi dan memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia. Kemudian, stagnasi elite dan personalisasi partai dapat mengurangi

¹⁵ Detik News. (2030). Sebab Kongres PDIP Tak Kunjung Digelar Kini Terungkap

daya tawar dan keberagaman politik, sehingga demokrasi secara elektoral dan substantif menjadi terancam oleh internal oligarki yang mengendalikan akses politik secara tertutup.

Penelitian ini menjadi sangat signifikan karena bertujuan untuk menguji dan menguraikan mekanisme stagnasi elite dalam partai politik, khususnya dengan perspektif teori sirkulasi elite dan teori elite politik. Teori sirkulasi elite menegaskan pentingnya proses pergantian dan pembaruan elite sebagai indikator kesehatan demokrasi dan demokratisasi, sementara itu teori elite politik mengkaji dinamika kekuasaan diantara kelompok elite yang mengendalikan struktur politik.

Dengan menggunakan pendekatan kedua teori ini, Penelitian bisa mengidentifikasi bagaimana mekanisme internal partai formal yaitu Kongres dan proses kaderisasi, justru dimanipulasi untuk mempertahankan kekuasaan elite lama alhasil menghambat regenerasi. Pendekatan ini memberikan kontribusi penting dalam ilmu politik, terutama dalam kajian partai politik dan kepemimpinan politik dengan menawarkan pemahaman menyeluruh tentang faktor-faktor yang menimbulkan stagnasi elite serta efektivitasnya bagi demokrasi internal partai dan kehidupan politik nasional secara luas.

Penelitian ini menyediakan dasar-dasar empiris dan teori yang bisa dipakai guna memperbaiki praktik demokrasi internal partai, mendorong regenerasi kepemimpinan yang sehat, dan memperkuat proses demokratisasi di Indonesia dengan menyediakan analisis menyeluruh yang lebih detail dan kritis tentang permasalahan stagnasi elite.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Menurut teori sirkulasi elite Vilfredo Pareto, kemampuan organisasi politik bertahan bergantung rapuh pada rotasi kepemimpinan yang periodik. Apabila pergantian elite gagal berlangsung secara kompetitif dan terbuka, muncul bukan kestabilan semata, melainkan kekakuan struktural kekuasaan. Fenomena ini, mengindikasikan elite berkuasa yang tidak lagi adaptif malahan fokus mempertahankan dominasi lewat kontrol internal yang ketat.

Gaetano Mosca mengonsolidasikan argumen tersebut dengan gagasan kelas politik: minoritas yang rapi organisasinya, menguasai massa lewat kendali institusional dan regulasi permainan kekuasaan. Dalam partai politik, penguasaan kongres, kaderisasi, dan distribusi menjadi peran krusial yang menyebabkan kokohnya reproduksi elite yang identik. Ketika kompetisi tidak memiliki ruang riil, demokrasi internal hanya sebagai prosedur formal jauh dari makna substantifnya.

Dominasi panjang kepemimpinan PDI Perjuangan memicu pertanyaan kritis di kalangan akademisi: apakah itu bentuk harmoni organisasi yang ideal atau bukti stagnasi elite akibat blokade sirkulasi kepemimpinan? Hal ini relevan karena partai tidak hanya berperan sebagai wadah kontestasi suara, namun juga pusat pergantian elite tingkat negara. Hambatan di tingkat internal dapat berpotensi melemahkan fondasi demokrasi yang lebih luas.

Mengacu pada beberapa masalah yang disampaikan sebelumnya dan Penelitian yang terdahulu, Penelitian merumuskan rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi stagnasi elite dalam tubuh PDI Perjuangan sejak 1993?
2. Bagaimana pola sirkulasi kepemimpinan di PDI Perjuangan?
3. Apa dampak stagnasi elite terhadap dinamika internal partai dan proses demokratisasi di lingkungan PDI Perjuangan?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, ditetapkan tujuan Penelitian sebagai berikut :

1. Menjelaskan pola sirkulasi kepemimpinan di tubuh PDI Perjuangan dari 1993 hingga 2030, termasuk peran dominan Megawati Soekarnoputri

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang penyebab stagnasi elite serta dampak stagnasi elite yang mempengaruhi dinamika organisasi dan praktik demokrasi internal partai.
3. Memberikan rekomendasi kepada PDI Perjuangan untuk memperbaiki mekanisme kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari judul

1. Manfaat Teoritis

Kajian ini berupaya mengisi celah literatur mengenai demokrasi internal partai politik, yaitu dengan menyajikan pemeriksaan kritis atas tagnasi elite yang dianalisis melalui pendekatan sirkulasi elite dan teori elite politik secara keseluruhan.. Penelitian ini menggunakan perspektif teori sirkulasi elite Pareto dan analisis elite politik Mosca, mengungkap dominasi elite serta politik dinasti sebagai fenomena sistemik yang stagnan, dipelihara oleh mekanisme kelambagaan, pembinaan kader berbasis kesetiaan, dan simbolis legitimasi dalam partai. kajian ini memperkaya pemahaman teoritis tentang bagaimana demokrasi internal terkikis menjadi sekadar formalitas akibat stagnasi elite yang berkepanjangan. Selanjutnya, temuan ini bisa menjadi rujukan akademik untuk penelitian lanjutan mengenai manajemen partai, proses kaderisasi, dan regenerasi kepemimpinan terkhusus PDI Perjuangan ataupun partai politik Indonesia lainnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan refleksi strategis untuk PDI Perjuangan dalam rangka pembenahan internal khususnya di aspek kaderisasi, regenerasi kepemimpinan, dan penguatan demokrasi dalam organissi. Pengamatan terhadap stagnasi elite dan kuasa figur pusat menekankan perlunya sistem rotasi kepemimpinan yang terbuka, bersaing sehat, dan juga berorientasi kompetensi, alhasil organisasi tetap tangguh dan

melahirkan pemimpin berkualitas di masa mendatang. Lebih lanjut, penelitian ini memberikan data empiris kepada masyarakat dan elite kebijakan mengenai konsekuensi panjang dominasi satu figur atas keterbukaan, pertanggungjawaban, dan keterlibatan kader partai yang akan berdampak luas pada mutu demokrasi nasional. Melampaui konteks PDI Perjuangan, temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan partai politik lain di Indonesia sebagai acuan untuk membangun struktur kepemimpinan yang lebih inklusif, adaptif, dan demokratis, ditambah pijakan awal reformasi internal berfungsi untuk mencegah politik dinasti dan stagnasi elite yang merugikan institusi. Maka dari itu, penelitian ini berpotensi memperkuat sistem kepartaian dan konsolidasi demokrasi nasional.

1.5 Sistematika Penulisan

Di sub-bab ini, Penelitian akan menjelaskan kerangka penulisan skripsi. Dalam penulisan Penelitian, Penelitian membagi enam bab dan akan diuraikan dari setiap bab menjadi sub-bab dari setiap subjek Penelitian. Dengan membagi kedalam sub-bab, penulis berharap agar pembaca lebih mudah dalam memahami pembahasan dari apa yang terdapat dalam isi penulisan. Berikut adalah penjelasan yang penulis rancang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pertama, Penelitian berusaha menjelaskan mengapa Penelitian mengangkat judul besar, yaitu ”Sirkulasi Kepemimpinan dalam Partai Politik: Studi tentang Stagnasi Elite di PDI Perjuangan Periode 1993–2030”. Selanjutnya, fokus Penelitian dan dampak yang telah dituangkan dan dirumuskan masuk ke dalam rumusan masalah dengan membuat sebuah garis besar pertanyaan dalam langkah awal memulai Penelitian ini. Kemudian diturunkan kembali ke dalam sub-bab yang berisi tujuan dan

manfaat Penelitian yang diharapkan dapat menjadi referensi dan rencana Penelitian di kemudian hari.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, Penelitian menuliskan tiga bagian besar yang akan menggambarkan apa yang akan di bahas pada bab pembahasan. Pertama, Penelitian terdahulu pada bagian ini

Penelitian mencantumkan berbagai referensi hasil karya beberapa Penelitian sebelumnya yang berfungsi untuk menjadi perspektif dalam pembahasan mengenai topik terkait. Kedua, teori dan konsep yang akan digunakan sebagai pisau analisis yang menjelaskan mengenai Penelitian ini, kemudian dijadikan korelasi antar dasar penggunaan pemikiran dengan pembahasan. Ketiga, terdapat alur berpikir Penelitian digunakan untuk kerangka berpikir agar Penelitian ini mempunyai gambaran yang jelas dan terfokus dengan apa yang sedang diteliti.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Dalam bab ini, Penelitian akan menjelaskan metodologis Penelitian yang akan dilakukan oleh Penelitian. Bab ini menggunakan jenis Penelitian kualitatif dengan sebuah analisis data yang dijelaskan secara deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang berisi mengenai informai utama dalam menjawab rumusan masalah dan menggunakan data sekunder yang berasal dari data-data pendukung yang tidak didapatkan dari data primer.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab Hasil dan Pembahasan, menjelaskan permasalahan yang telah diberikan dalam kerangka pemikiran dan disamakan dengan teori yang telah dipersiapkan di awal. Di bab ini penulis memberikan pandangannya dan mengkorelasikan pandangan-pandangan dari pihak yang ikut terlibat dalam menjelaskan mengenai keadaan yang sebenarnya terjadi untuk menguraikan stagnasi elite di dalam tubuh partai.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab Penutup yang berisi Kesimpulan dari Penelitian yang telah dilakukan, berisi ringkasan utama serta jawaban dari suatu masalah. Penelitian ini juga memberikan saran yang bisa menjadi masukan bagi PDI Perjuangan untuk memperbaiki mekanisme kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan serta rekomendasi untuk Penelitian berikutnya.

